

ABSTRAK

Ivana Dhea Ananda, 21382072009, *Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab.Sumenep Dalam Menangani Kegiatan Perparkiran Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir*, Skripsi, Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Madura, Pembimbing Agung Fakhruzy SH.MH.

Kata Kunci: Perparkiran, Retribusi, Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000

Dinas Perhubungan KabupatenSumenep memiliki peran dalam pengelolaan jasa perparkiran di sepanjang seluruh tepi jalan. Namun dalam praktiknya, masih banyak di temukan aktivitas perparkiran tanpa izin yang beroperasi di berbagai titik, sehingga menimbulkan potensi kerugian bagi Pemerintah DaerahSumenep serta ketidakpastian hukum bagi Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan dalam menangani kegiatan perparkiran tanpa izin serta untuk mengetahui apa saja faktor penghambat dalam penegakan aturan perparkiran di Kab.Sumenep.

Dalam Penelitian ini terdapat rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana Peran Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan Kab.Sumenep Dalam Menangani Kegiatan Perparkiran Tanpa Izin Berdasarkan Peraturan Daerah No 6 Tahun 2000 Tentang Retribusi Parkir? 2) Apa saja faktor penghambat dalam penegakan aturan terhadap perparkiran tanpa izin di KabupatenSumenep? Penelitian ini menggunakan metode Penelitian hukum empiris dengan pendekatan sosiologi hukum. Data yang diperoleh yaitu melalui wawancara dengan pihak Dinas Perhubungan, observasi di lapangan, serta studi dokumentasi terhadap regulasi terkait. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki tanggung jawab dalam pengawasan dan penindakan terhadap parkir liar, namun masih terdapat kendala dalam implementasi kebijakan, seperti kurangnya koordinasi dengan instansi terkait, keterbatasan pengawasan di lapangan, serta kurangnya kesadaran masyarakat dalam melaporkan pelanggaran parkir. Selain itu, ditemukan bahwa parkir di tepi jalan yang dikelola Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan memiliki sistem berlangganan dan non-berlangganan, sedangkan parkir di lokasi khusus seperti pasar berada di bawah wewenang Dinas Perindustrian dan Perdagangan.

Berdasarkan temuan Penelitian, disarankan agar Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman dan Perhubungan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam pengelolaan parkir, memperkuat sistem pengawasan dan penindakan terhadap pelanggaran parkir, serta meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat mengenai mekanisme pelaporan parkir liar. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan implementasi Peraturan Daerah No. 6 Tahun 2000 dapat lebih efektif dalam menciptakan sistem perparkiran yang tertib dan sesuai dengan regulasi di Kab.Sumenep.